

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Kemiskinan

2.1.1.1 Konsep dan Definisi Kemiskinan

Kemiskinan secara konseptual dalam Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan atau TNP2K (Adji, dkk., 2020: 10) pada dasarnya dibagi menjadi kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif, yang memiliki perbedaan pada standar penilaiannya. Sedangkan berdasarkan faktor penyebabnya dalam Kementerian PPN/Bappenas (2018: 9) kemiskinan dibagi menjadi tiga yaitu kemiskinan alamiah, kemiskinan struktural, dan kemiskinan kultural. Penjelasan masing-masing konseptual kemiskinan yaitu sebagai berikut:

- 1) Kemiskinan absolut. Konsep kemiskinan absolut dalam TNP2K (Adji, dkk, 2020: 10) berpedoman pada standar hidup minimum yang dianggap layak di suatu wilayah dalam waktu tertentu. Seseorang tergolong miskin menurut konsep kemiskinan absolut, apabila tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok minimum, seperti sandang, pangan, perumahan kesehatan, dan pendidikan yang dibutuhkan agar dapat hidup layak dan bekerja secara optimal (*basic needs approach*). Kelebihan pada konsep kemiskinan absolut salah satunya yaitu apabila definisi kemiskinan yang diyakini tidak berubah, kemiskinan absolut dapat dibandingkan antarwaktu dan antardaerah. Sehingga dapat

digunakan untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan penanggulangan kemiskinan.

- 2) Kemiskinan relatif. Garis kemiskinan relatif dalam TNP2K (Adji, dkk, 2020: 11) bergantung pada kesepakatan masyarakat mengenai kelompok masyarakat termiskin. Jika kesepakatan tercapai, garis kemiskinan bisa ditetapkan. Garis kemiskinan relatif tidak dapat dipakai untuk membandingkan tingkat kemiskinan antardaerah dan antarwaktu karena tidak mencerminkan tingkat kesejahteraan yang sama. Namun untuk menentukan sasaran program yang ditujukan untuk penduduk miskin, ukuran kemiskinan relatif bisa digunakan.
- 3) Kemiskinan alamiah. Kemiskinan alamiah dalam Kementerian PPN/Bappenas (2018: 9) merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh faktor alam dan geografis yang tidak mendukung, misalnya karena kondisi alam yang gersang (kering dan tidak teratur), sumber daya alam yang terbatas, dan wilayah yang terisolasi.
- 4) Kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural dalam Kementerian PPN/Bappenas (2018: 9) merupakan kemiskinan yang disebabkan karena kesalahan dalam kebijakan pemerintah. Contohnya yaitu kebijakan *urban bias* yang didefinisikan oleh Michael Lipton (1977) sebagai penyebab dari tetap tingginya kemiskinan di daerah.
- 5) Kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural dalam Kementerian PPN/Bappenas (2018: 9) merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh faktor sosial kultural di suatu masyarakat. Faktor-faktor sosial kultural tersebut,

menjadikan masyarakat semakin terperangkap di dalam kondisi kemiskinan dan seolah-olah telah menjadi budaya masyarakat. Oscar Lewis menyebutnya sebagai budaya kemiskinan.

2.1.1.2 Penyebab Kemiskinan

Faktor-faktor penyebab kemiskinan yang bersumber dari berbagai pendapat ahli dalam Kementerian PPN/Bappenas (2018: 14-15) dapat dikelompokkan ke dalam beberapa faktor yaitu:

- 1) Kemiskinan dapat terjadi diakibatkan kondisi alam dan lingkungan seperti adanya bencana alam, kerusakan lingkungan, dan distribusi sumber daya yang tidak merata.
- 2) Tingginya pertumbuhan penduduk yang mengakibatkan adanya tekanan sumber daya alam dan migrasi penduduk dari perdesaan ke perkotaan.
- 3) Eksploitasi yang terjadi dalam masyarakat baik antarkelas, antarkelompok, antarwilayah, dan antarnegara, termasuk hubungan ekonomi internasional yang tidak seimbang antara negara maju dan negara berkembang.
- 4) Kelembagaan dan struktural seperti adanya berbagai kebijakan pemerintah yang tidak tepat dan cenderung mengabaikan daerah perdesaan.
- 5) Teknologi yang mendorong dan meningkatkan produktivitas usaha tani atau pertanian yang menjadi pesaing penduduk perdesaan yang mayoritas mata pencaharian utamanya di bidang pertanian termasuk di dalamnya penduduk miskin di negara berkembang.

Menurut Sondakh (1994) dalam Girsang (2011: 14-15) ada empat penyebab kemiskinan yang terjadi bersamaan, yakni tabungan rendah, pendidikan rendah,

gizi rendah dan *production squeeze*. Tabungan rendah mengakibatkan investasi dan produksi rendah. Pendidikan rendah berakibat pada kesempatan yang rendah dan upah rendah. Gizi rendah menciptakan sumberdaya manusia yang produktifitas dan produksi rendah. Intervensi pemerintah seringkali justru mendorong pemerintah dan swasta menguras atau memerah sumberdaya alam dan produksi daerah (*production squeeze*) dengan bagi hasil yang tidak adil. Semua penyebab tersebut akan mengakibatkan satu hal yakni pendapatan rendah, daya beli serta posisi tawar lemah.

2.1.1.3 Strategi dan Kebijakan untuk Penanggulangan Kemiskinan

Nafziger (2005) dalam bukunya yang berjudul *Economic Development* (Kementerian PPN/Bappenas, 2018: 16-17) menjelaskan strategi dan kebijakan untuk penanggulangan kemiskinan:

- 1) Reformasi agraria dan redistribusi lahan. Di banyak negara berkembang, ketersediaan lahan pertanian yang subur sudah semakin berkurang. Sementara kepemilikan lahan terkonsentrasi pada sekelompok kecil petani pemilik lahan. Adanya reformasi agraria dan redistribusi lahan menjadi hal utama dalam upaya mengurangi kemiskinan.
- 2) Permodalan dan perkreditan. Kelompok miskin mengalami kesulitan dalam mengakses sumber kredit dan permodalan misalnya perbankan. Hal ini disebabkan karena prosedur yang rumit dan tidak tersedia jaminan. Program perkreditan dan permodalan khusus bagi bagi kelompok miskin dengan persyaratan dan prosedur yang lebih mudah dan terjangkau seperti model “Grameen Bank” di Bangladesh perlu terus dikembangkan.

- 3) Kebijakan peningkatan pendidikan dan latihan yang merupakan investasi modal manusia sangat penting untuk menghasilkan aliran pendapatan sepanjang waktu. Kualitas pendidikan perlu dibarengi oleh peningkatan derajat kesehatan dan nutrisi penduduk, khususnya anak-anak di keluarga miskin agar mereka tidak terjerat kemiskinan lagi.

Todaro dan Smith (2015) dalam Kementerian PPN/Bappenas (2018: 17) menyampaikan bahwa transfer langsung dan subsidi efektif dalam penanggulangan kemiskinan dengan beberapa prasyarat seperti keterbatasan sumber daya sehingga transfer dan subsidi harus dipastikan penerimanya merupakan mereka yang benar-benar membutuhkan. Lalu, penerima transfer dan subsidi tidak tergantung pada bantuan, tetapi termotivasi membangun aset seperti pendidikan anak yang dikemudian hari dapat mencegah anaknya tetap dalam kondisi miskin.

2.1.2 Inklusi Keuangan

2.1.2.1. Definisi Inklusi Keuangan

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76 /POJK.07/2016 tentang peningkatan literasi dan inklusi keuangan di sektor jasa keuangan bagi konsumen dan/atau masyarakat Pasal 1 Nomor 7 definisi inklusi keuangan adalah ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, definisi inklusi keuangan menurut Consultative Group to Assist the Poor (CGAP, 2016) dalam Otoritas Jasa Keuangan (2017: 20) yaitu rumah tangga dan bisnis memiliki akses terhadap penggunaan produk dan layanan jasa keuangan secara efektif. Produk dan layanan jasa keuangan harus tersedia

secara berkelanjutan dan teregulasi dengan baik. Berdasarkan definisi yang ada, dapat disimpulkan bahwa unsur yang berperan dalam inklusi keuangan adalah akses, ketersediaan, penggunaan, serta kualitas produk dan layanan jasa keuangan.

2.1.2.2. Tujuan Inklusi Keuangan

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 Bab III Pasal 12, setidaknya terdapat empat tujuan inklusi keuangan yaitu:

- 1) Meningkatnya akses masyarakat terhadap lembaga, produk dan layanan jasa keuangan PUJK.
- 2) Meningkatnya penyediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan oleh PUJK yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat.
- 3) Meningkatnya penggunaan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat.
- 4) Meningkatnya kualitas penggunaan produk dan layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat.

2.1.2.3. Manfaat Inklusi Keuangan

Manfaat adanya program inklusi keuangan, yang diharapkan dapat dirasakan oleh berbagai pihak, seperti pemerintah, industri jasa keuangan, dan masyarakat (Otoritas Jasa Keuangan, 2016: 4) yaitu:

- 1) Manfaat bagi pemerintah:
 - a) Meningkatnya percepatan akses keuangan.
 - b) Meningkatnya sumber dana dalam negeri yang dapat mendukung pembangunan nasional.

- c) Meningkatnya ketahanan keuangan terhadap guncangan perekonomian dan mempertahankan stabilitas ekonomi nasional.
 - d) Terciptanya pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Manfaat bagi industri jasa keuangan:
- a) Meningkatnya *new based customer*.
 - b) Memunculkan *cross selling effect* dan pangsa bisnis yang potensial.
 - c) Mendukung pendalaman pasar.
- 3) Manfaat bagi masyarakat:
- a) Tersedianya pilihan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan.
 - b) Mitigasi risiko terhadap kondisi yang tidak diinginkan dan guncangan keuangan (*financial shocks*).
 - c) Terdapatnya kemudahan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.
 - d) Mengurangi *shadow banking* atau *irresponsible finance*.

2.1.2.4. Indikator Keuangan Inklusif

Sarma dalam *working paper*-nya yang berjudul *Index of Financial Inclusion – A measure of financial sector inclusiveness* pada tahun 2012 mengemukakan terdapat tiga dimensi yang digunakan untuk mewakili *multidimensi* dari keuangan inklusif yaitu dimensi penetrasi perbankan (*banking penetration*), dimensi ketersediaan layanan perbankan (*availability of banking services*), dan dimensi kegunaan (*usage*) dari layanan perbankan. Perhitungan pada masing-masing dimensi sebagai berikut:

- 1) Dimensi *banking penetration* (penetrasi perbankan) merupakan hasil dari variabel jumlah rekening perbankan per 1.000 populasi penduduk dewasa.
- 2) Dimensi *availability* (ketersediaan) merupakan hasil variabel jumlah kantor layanan perbankan dan/atau variabel jumlah mesin ATM per 100.000 populasi penduduk dewasa.
- 3) Dimensi *usage* (kegunaan) merupakan hasil variabel jumlah kredit dan deposit per PDB.

Bank Indonesia menggunakan indikator inklusi keuangan yang dipublikasikan melalui Stabilitas Sistem Keuangan di Indonesia dengan komponen-komponen indikator sebagai berikut:

- 1) Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan terhadap PDB Harga Berlaku.
- 2) Kredit Perbankan terhadap PDB Harga Berlaku.
- 3) Jumlah Kantor Layanan Bank per 100 ribu Penduduk Dewasa.
- 4) Jumlah Mesin Automated Teller Machine (ATM) per 100 ribu Penduduk Dewasa.
- 5) Jumlah Agen Layanan Keuangan Digital (LKD) per 100 ribu Penduduk Dewasa.
- 6) Jumlah Kantor Layanan Bank per 1.000 km².
- 7) Jumlah Mesin ATM per 1.000 km².
- 8) Jumlah Agen LKD per 1.000 km².
- 9) Jumlah Rekening DPK Perbankan per 1.000 Penduduk Dewasa.
- 10) Jumlah Rekening Kredit Perbankan per 1.000 Penduduk Dewasa.
- 11) Jumlah Rekening Kredit UMKM Perbankan per 1.000 Penduduk Dewasa.

- 12) Jumlah Uang Elektronik per 1.000 Penduduk Dewasa.
- 13) Jumlah Rekening Uang Elektronik Register pada Agen LKD per 1.000 Penduduk Dewasa.

Unsur-unsur dalam komponen inklusi keuangan yaitu akses, ketersediaan, penggunaan, serta kualitas produk dan layanan jasa keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2017: 20-21). Akses adalah infrastruktur yang disediakan oleh lembaga jasa keuangan agar masyarakat dapat menjangkau baik lembaga, produk dan layanan jasa keuangan yang bersifat formal. Contoh perluasan akses keuangan antara lain:

- 1) Penambahan jaringan kantor.
- 2) Penambahan jumlah agen.
- 3) Penambahan jumlah ATM.
- 4) Penambahan *point of access* melalui layanan digital.
- 5) Persiapan infrastruktur berbentuk fasilitas nir kantor (*branchless*);
- 6) Penambahan kerja sama dengan pihak lain.
- 7) Pengembangan *delivery channel* atau saluran distribusi produk dan layanan jasa keuangan.

Ketersediaan produk dan layanan jasa keuangan harus yang dibutuhkan oleh seluruh kalangan masyarakat agar dapat memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Selain itu, perlu penyesuaian dengan karakter masyarakat yang dapat dijangkau baik dari segi harga maupun aksesnya. Penggunaan produk dan layanan jasa keuangan oleh masyarakat merupakan tujuan akhir dari inklusi keuangan sehingga diharapkan masyarakat

bukan hanya menikmati produk dan layanan jasa keuangan yang digunakannya, melainkan juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kualitas produk dan layanan jasa keuangan dapat diartikan penggunaan produk dan layanan jasa keuangan oleh masyarakat secara aktif yang berarti produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga frekuensi penggunaannya relatif tinggi.

2.1.2.5. Strategi, Kebijakan, dan Program Inklusi Keuangan

Penerbitan kebijakan-kebijakan terkait strategi Nasional Keuangan Inklusif, yaitu:

- 1) Perpres No 82/2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.
- 2) Kepmenko Perekonomian No 93/2017 tentang Kelompok Kerja dan Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif.
- 3) Permenko Perekonomian No 6/2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Dewan Nasional Keuangan Inklusif.

Pelaksanaan program-program penjangkauan masyarakat terkait keuangan inklusif, yaitu:

- 1) Program Bantuan Non-Tunai di antaranya Bantuan Sosial Non-Tunai, Bantuan Pangan Non-Tunai, Kartu Tani, dan Program Indonesia Pintar.
- 2) Program kredit bagi usaha masyarakat di antaranya Kredit Usaha Rakyat dan Membina Keluarga Sejahtera (Mekaar).
- 3) Program layanan keuangan melalui keagenan yaitu Layanan Keuangan Digital dan Laku Pandai di mana masyarakat dapat membuka rekening melalui agen.

Regulator sektor layanan keuangan dan infrastruktur di Indonesia telah berhasil mendorong beberapa hal kunci dalam meningkatkan ekosistem layanan keuangan melalui:

- 1) Gerakan Nasional Non-Tunai telah mendorong *Less Cash Society*.
- 2) Pengembangan regulasi yang memfasilitasi pertumbuhan teknologi.
- 3) Pelaksanaan Palapa Ring dan pembangunan *Base Transceiver Station* telah meningkatkan cakupan layanan internet hingga mencapai 55 persen desa di Indonesia.
- 4) Peluncuran Gerbang Pembayaran Nasional pada 4 Desember 2017 memperluas interoperabilitas layanan keuangan.

2.1.2.6. Kelompok Sasaran Keuangan Inklusif

Keuangan inklusif merupakan strategi pembangunan nasional yang berpusat pada masyarakat ditujukan untuk kelompok yang mengalami hambatan dalam mengakses layanan keuangan. Kelompok dengan kebutuhan terbesar atau belum dipenuhi atas layanan keuangan yaitu tiga kategori penduduk (orang miskin berpendapatan rendah, orang miskin bekerja/miskin produktif, dan orang hampir miskin) dan tiga lintas kategori (pekerja migran, perempuan, dan penduduk daerah tertinggal). Penjelasan masing-masing kelompok sasaran keuangan inklusif sebagai berikut (Bank Indonesia, 2014: 9):

- 1) Miskin berpendapatan terendah yaitu masyarakat yang memiliki akses sangat terbatas atau tanpa akses sama sekali ke semua jenis layanan keuangan. Kategori ini merujuk pada golongan masyarakat yang sangat miskin dan

mungkin menerima bantuan sosial, serta segmen bawah kategori miskin yang menjadi bagian dari program pemberdayaan masyarakat.

- 2) Miskin bekerja yaitu masyarakat miskin yang berusaha sendiri, termasuk di dalamnya petani kecil dan marjinal, nelayan, seniman dan perajin, pedagang kecil, dan pengusaha mikro di sektor informal baik di perkotaan dan perdesaan. Kurangnya sumber daya membatasi kemampuan mereka untuk memperluas produksi atau melakukan perbaikan dalam hal produktivitas dan pendapatan.
- 3) Bukan miskin yaitu masyarakat yang tidak memenuhi kriteria untuk masuk dalam kelompok masyarakat miskin berpendapatan terendah dan miskin bekerja.
- 4) Pekerja migran domestik dan internasional atau sering disebut Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mana mayoritas perempuan dan lebih dari 85 persen bekerja di sektor informal. TKI biasanya kurang terlayani oleh sektor keuangan, atau memiliki akses yang terbatas ke layanan keuangan. Mereka membutuhkan sarana untuk mengirim uang secara aman, cepat, dan murah dari tempat kerja ke rumah, yang sering kali terletak di daerah terpencil dan tertinggal.
- 5) Perempuan yang mana kerap terdapat perbedaan besar dengan laki-laki dalam hal akses, kebutuhan, dan pilihan mereka terhadap jasa keuangan. Di Indonesia, laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk mempunyai rekening tabungan. Adanya perbedaan motivasi antara laki-laki dan perempuan dalam menggunakan produk dan layanan jasa keuangan.

Motivasi utama laki-laki saat membuka rekening tabungan bank lebih sering adalah untuk memperoleh kredit, sedangkan perempuan menabung demi keperluan mendatang. Dalam hal kepemilikan asuransi, perempuan lebih sering membeli asuransi pendidikan, sementara laki-laki lebih memilih asuransi jiwa, dan pada taraf tertentu juga memiliki asuransi harta benda.

- 6) Penduduk daerah terpencil dengan kondisi sebaran geografis dari kepulauan Indonesia yang luas dan belum meratanya pembangunan menunjukkan pentingnya strategi nasional keuangan inklusif untuk memberi perhatian khusus kepada masyarakat di daerah-daerah terpencil.

2.1.2.7. Kendala dan Tantangan Inklusi Keuangan

Kendala dan tantangan dalam program inklusi keuangan di Indonesia dalam Otoritas Jasa Keuangan (2016: 26) dipaparkan sebagai berikut:

- 1) Hambatan teknis dan lisensi mempengaruhi kesiapan penggunaan data biometrik bagi layanan keuangan.
- 2) Hukum dan regulasi yang belum memungkinkan perluasan peran Telkom dan PT Pos Indonesia dalam pembukaan rekening.
- 3) Standar layanan yang kurang siap dalam tata kelola sebagian koperasi untuk memenuhi standar layanan keuangan yang diatur oleh regulator.
- 4) Besarnya sumber daya untuk kampanye kesadaran membuka rekening yang dapat menjangkau seluruh masyarakat yang belum terlayani.
- 5) Besarnya biaya anggaran yang dibutuhkan untuk memberikan insentif bagi masyarakat apabila program wajib membuka rekening dilaksanakan.

- 6) Sumber daya manusia yang belum memadai, jumlah juru ukur pertanahan tidak sebanding dengan kebutuhan pengukuran tanah sebagai salah satu proses sertifikasi tanah.

Salah satu hambatan utama bagi pelaksanaan kebijakan yang konkrit dalam meningkatkan akses terhadap jasa keuangan dan sistem keuangan inklusif adalah tidak adanya data dan analisis yang menyeluruh akan persepsi konsumen yang sesungguhnya tentang kebutuhan dan hambatan akan jasa keuangan (World Bank, 2010). Buruknya kondisi ekonomi dan rendahnya tingkat literasi keuangan merupakan hambatan utama akan akses jasa keuangan. Lemahnya kondisi keuangan dan kurangnya pengetahuan keuangan menjadi alasan utama banyak masyarakat tidak berinteraksi dengan jasa tabungan, pinjaman atau asuransi. Masyarakat yang tidak memiliki tabungan menyatakan bahwa tidak terdapatnya cukup uang (kurangnya pendapatan atau seluruhnya dihabiskan untuk konsumsi) sebagai alasan utama tidak menabung. Rendahnya tingkat kelayakan kredit adalah alasan utama untuk tidak meminjam, diikuti dengan tidak adanya agunan di posisi berikutnya. Untuk asuransi, rendahnya pendapatan dan lemahnya pengetahuan akan produk-produk asuransi adalah alasan utama untuk tidak memiliki asuransi. Akses fisik kepada penyedia jasa keuangan adalah masalah tambahan yang dikemukakan populasi pedesaan di luar pulau Jawa.

Semua informasi yang terkait dengan alasan responden untuk tidak menggunakan produk dan layanan jasa keuangan (World Bank, 2010):

- 1) Hambatan akses fisik: rata-rata jarak atau waktu yang dibutuhkan untuk pergi dari rumah ke kantor layanan bank atau ATM terdekat.

- 2) Hambatan pemenuhan syarat: jumlah dokumen yang dibutuhkan untuk membuka rekening bank.
- 3) Hambatan biaya: besaran biaya bulanan atau saldo minimum.
- 4) Hambatan kesesuaian produk: kesesuaian produk-produk yang ada (seperti: tabungan sederhana, kredit investasi atau asuransi kesehatan) dalam membantu penghidupan rumah tangga.

2.1.3 Pengangguran

2.1.3.1 Konsep dan Definisi Pengangguran

Berdasarkan *Key Indicators of the Labour Market* (KILM) yang direkomendasikan International Labour Organization (ILO) poin 8 (Badan Pusat Statistik, 2007: 16) *unemployment*/pengangguran merupakan proporsi angkatan kerja yang tidak bekerja dan secara aktif sedang mencari pekerjaan. Sesuai kesepakatan internasional, pengangguran didefinisikan sebagai semua penduduk usia kerja yang pada suatu referensi waktu tidak punya pekerjaan (*without work*), sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja (*currently available for work*), dan sedang mencari pekerjaan (*seeking work*). Di Indonesia indikator ini didefinisikan sebagai Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Setengah pengangguran merupakan keadaan dari seseorang yang telah bekerja, tetapi mengalami ketidakpuasan atas pekerjaan yang dilakukannya. Di Indonesia, setengah pengangguran didefinisikan sebagai penduduk bekerja yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Berdasarkan keadaan tersebut, maka konsep setengah pengangguran dibedakan menjadi dua, yaitu (Badan Pusat Statistik, 2007: 81):

- 1) Setengah pengangguran terpaksa, yaitu mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu) dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan lain (*visible underemployment*).
- 2) Setengah pengangguran sukarela, yaitu mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu) tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain, sering disebut juga sebagai pekerja paruh waktu (*part time worker*).

Indikator setengah pengangguran ini dapat digunakan sebagai acuan pemerintah dalam rangka meningkatkan tingkat utilisasi, kegunaan, dan produktivitas pekerja.

2.1.3.2 Jenis – Jenis Pengangguran

Berikut jenis-jenis pengangguran dalam Badan Pusat Statistik (2007: 82):

- 1) Pengangguran friksional (*frictional unemployment*) adalah pengangguran yang sifatnya sementara yang disebabkan adanya kendala waktu, informasi, dan kondisi geografis antara pelamar kerja dan pembuka lapangan kerja.
- 2) Pengangguran struktural (*structural unemployment*) adalah keadaan dimana penganggur yang mencari lapangan pekerjaan tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan pembuka lapangan kerja. Semakin maju keadaan perekonomian di suatu daerah maka akan terjadi peningkatan kebutuhan akan sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang lebih baik dari sebelumnya.
- 3) Pengangguran musiman (*seasonal unemployment*) adalah keadaan seseorang menganggur karena adanya fluktuasi kegiatan ekonomi jangka pendek.

Sebagai contoh, petani yang menanti musim tanam, tukang jualan durian yang menanti musim durian, dan sebagainya.

- 4) Pengangguran bersiklus/konjungtur (*cyclical unemployment*) adalah pengangguran yang terjadi akibat imbas dari naik turunnya siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah dari pada penawaran tenaga kerja.

2.1.3.3 Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pengangguran

Beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pengangguran dalam perekonomian suatu negara diantaranya (Gatiningsih, dan Sutrisno, 2017: 107-108):

- 1) Turunnya output dan pengeluaran total. Jika output dan pengeluaran total menurun, maka permintaan terhadap tenaga kerja sangat rendah. Ini artinya sama dengan terjadi peningkatan pengangguran. Ketika siklus perekonomian sedang menurun, maka para pencari pekerjaan dipaksa untuk menganggur karena terlalu banyaknya tenaga kerja yang ingin bekerja, namun pekerjaan itu tidak tersedia.
- 2) Tidak sebandingnya penawaran dengan permintaan pekerja. Ketidaksebandingan dapat terjadi karena permintaan terhadap satu jenis tenaga kerja meningkat, sedangkan permintaan untuk jenis lainnya menurun, sementara penawaran tidak cukup mampu menyesuaikan. Para pekerja tidak dipekerjakan bukan karena sedang mencari pekerjaan yang paling cocok dengan keahlian mereka, namun pada tingkat upah berlaku, penawaran tenaga kerja melebihi permintaannya.

- 3) Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Mencari Pekerjaan. Para pekerja memiliki preferensi serta kemampuan yang berbeda, dan pekerjaan memiliki karakteristik yang berbeda. Mencari pekerjaan yang tepat membutuhkan waktu dan usaha. Ketika sebagian pekerja ingin berpindah atau bergeser atau mencari pekerjaan yang lebih baik dengan meninggalkan pekerjaan lamanya, maka pekerja ini untuk sementara menganggur.
- 4) Perubahan Teknologi. Teknologi selalu berkembang dan ini membutuhkan tenaga kerja yang mampu menyesuaikan perkembangan teknologinya. Sebagian pekerjaan memang digantikan oleh mesin yang membutuhkan operator lebih sedikit. Sehingga jumlah tenaga kerja untuk suatu pekerjaan yang dapat digantikan oleh mesin tersebut menjadi berkurang.

2.1.3.4 Dampak Pengangguran

Tentunya permasalahan ini akan membawa dampak yang buruk bagi kestabilan perekonomian Negara. Dampak-dampak negatif lainnya diantaranya (Gatiningsih, dan Sutrisno, 2017: 114-115):

- 1) Timbulnya kemiskinan. Menganggur menjadikan seseorang tidak akan bisa memperoleh penghasilan. Sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Seseorang dikatakan miskin apabila pendapatan perharinya dibawah Rp 7.500 perharinya (berdasarkan standar Indonesia) sementara berdasarkan standar kemiskinan PBB yaitu pendapatan perharinya di bawah \$2.
- 2) Makin beragamnya tindak pidana kriminal. Seseorang pasti dituntut untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam hidupnya terutama makan untuk tetap bisa bertahan hidup. Namun seorang pengangguran dalam keadaan terdesak

bisa saja melakukan tindakan kriminal seperti mencuri, mencopet, atau bahkan membunuh.

- 3) Bertambahnya jumlah anak jalanan, pengemis, pengamen, perdagangan anak dan sebagainya. Selain maraknya tindak pidana kriminal, akan bertambah juga pengamen atau pengemis.
- 4) Terjadinya kekacauan sosial dan politik seperti terjadinya demonstrasi dan perebutan kekuasaan.
- 5) Terganggunya kondisi psikis seseorang. Misalnya, terjadi pembunuhan akibat masalah ekonomi, terjadi pencurian dan perampokan akibat masalah ekonomi, rendahnya tingkat kesehatan dan gizi masyarakat.

2.1.3.5 Kebijakan dan Program Penanggulangan Pengangguran

Untuk mengatasi permasalahan ketenagakerjaan khususnya masalah pengangguran tentunya diperlukan kebijakan dan program penanggulangan pengangguran secara komprehensif dan tepat.

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengamanatkan bahwa pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan, dan meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya tersebut tidak terlepas dari upaya peningkatan produktivitas. Dalam upaya mengatasi berbagai

permasalahan dalam bidang Ketenagakerjaan, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) melaksanakan berbagai kebijakan strategis yang salah satunya adalah Program Aksi Gerakan Penanggulangan Pengangguran (GPP) tahun 2008. Program Aksi GPP ini merupakan bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-M) yang merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan kesempatan kerja dalam rangka menanggulangi pengangguran dan kemiskinan.

- 2) *Seputar Wacana Solusi Masalah Pengangguran di Indonesia*. Masyarakat atau pemerhati masalah ketenagakerjaan, secara terbuka telah banyak memberikan solusi berkaitan dengan masalah pengangguran di Indonesia, salah satu diantaranya adalah solusi yang ditawarkan oleh Daulat Sinuraya, Sekjen Himpunan Pembina Sumberdaya Manusia Indonesia (HPSMI). Solusi pengangguran dapat dilakukan melalui berbagai strategi dan kebijakan yang dapat ditempuh melalui kebijakan makro (umum) dan mikro (khusus). Kebijakan makro yang berkaitan erat dengan pengangguran, antara lain kebijakan moneter berupa uang beredar, tingkat suku bunga, inflasi, dan nilai tukar yang melibatkan Bank Indonesia (Bank Sentral), fiskal (Departemen Keuangan), dan lainnya. Kebijakan mikro dapat dijabarkan sebagai berikut:
 - a) Pengembangan mindset dan wawasan penganggur, berangkat dari kesadaran bahwa setiap manusia sesungguhnya memiliki potensi dalam dirinya namun sering tidak menyadari dan mengembangkan secara optimal.

- b) Pengembangan kawasan-kawasan, khususnya yang tertinggal dan terpencil sebagai prioritas dengan membangun fasilitas transportasi dan komunikasi.
- c) Membangun lembaga sosial yang dapat menjamin kehidupan penganggur.
- d) Menyederhanakan perizinan karena dewasa ini terlalu banyak jenis perizinan yang menghambat investasi baik Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan investasi masyarakat secara perorangan maupun kelompok.
- e) Mengaitkan secara erat (sinergi) masalah pengangguran dengan masalah di wilayah perkotaan lainnya, seperti sampah, pengendalian banjir, dan lingkungan yang tidak sehat.
- f) Mengembangkan suatu lembaga antarkerja secara profesional. Lembaga itu dapat disebutkan sebagai *job center* dan dibangun serta dikembangkan secara profesional sehingga dapat membimbing dan menyalurkan para pencari kerja..
- g) Menyeleksi TKI yang akan dikirim ke luar negeri. Sebaiknya diupayakan tenaga-tenaga terampil (*skilled*).
- h) Disempurnakan kurikulum dan sistem pendidikan nasional (Sisdiknas).
- i) Mencegah perselisihan hubungan industrial (PHI) dan pemutusan hubungan kerja (PHK).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Zahidi dan Khan (2019) membahas tentang sejauh mana pengaruh inklusi keuangan pada pengentasan kemiskinan di Afghanistan. Variabel terikat pada penelitian ini yaitu Pengentasan Kemiskinan (*Poverty Allevation*) dan variabel bebas yaitu Inklusi Keuangan (Akses, Kegunaan, dan Kualitas dari layanan keuangan). Selain itu peneliti menambahkan variabel teknologi, infrastruktur, literasi keuangan, dan demografi dalam analisis regresi berganda. Jenis data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder. Alat analisis yang digunakan yaitu regresi linear menggunakan IBM SPSS Statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akses dari layanan keuangan berpengaruh signifikan dalam pengentasan kemiskinan, lalu Kualitas dari layanan keuangan berpengaruh positif signifikan pada pengentasan kemiskinan, dan Kegunaan dari layanan keuangan tidak berpengaruh signifikan dalam pengentasan kemiskinan. Faktor seperti infrastruktur, teknologi, dan literasi keuangan dapat mengurangi kemiskinan melalui inklusi keuangan.

Selanjutnya Ratnawati (2020) menulis publikasi ilmiah yang membahas tentang pengaruh inklusi keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan stabilitas keuangan di beberapa negara-negara di Asia. Objek penelitian ini adalah 10 negara berkembang di Asia yaitu Afghanistan, Bangladesh, Brunei Darussalam, India, Indonesia, Malaysia, Pakistan, Philippines, Singapore, dan Thailand. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari publikasi International Monetary Fund (IMF) dengan periode penelitian tahun 2009-2018. Variabel bebas pada penelitian ini yaitu Inklusi

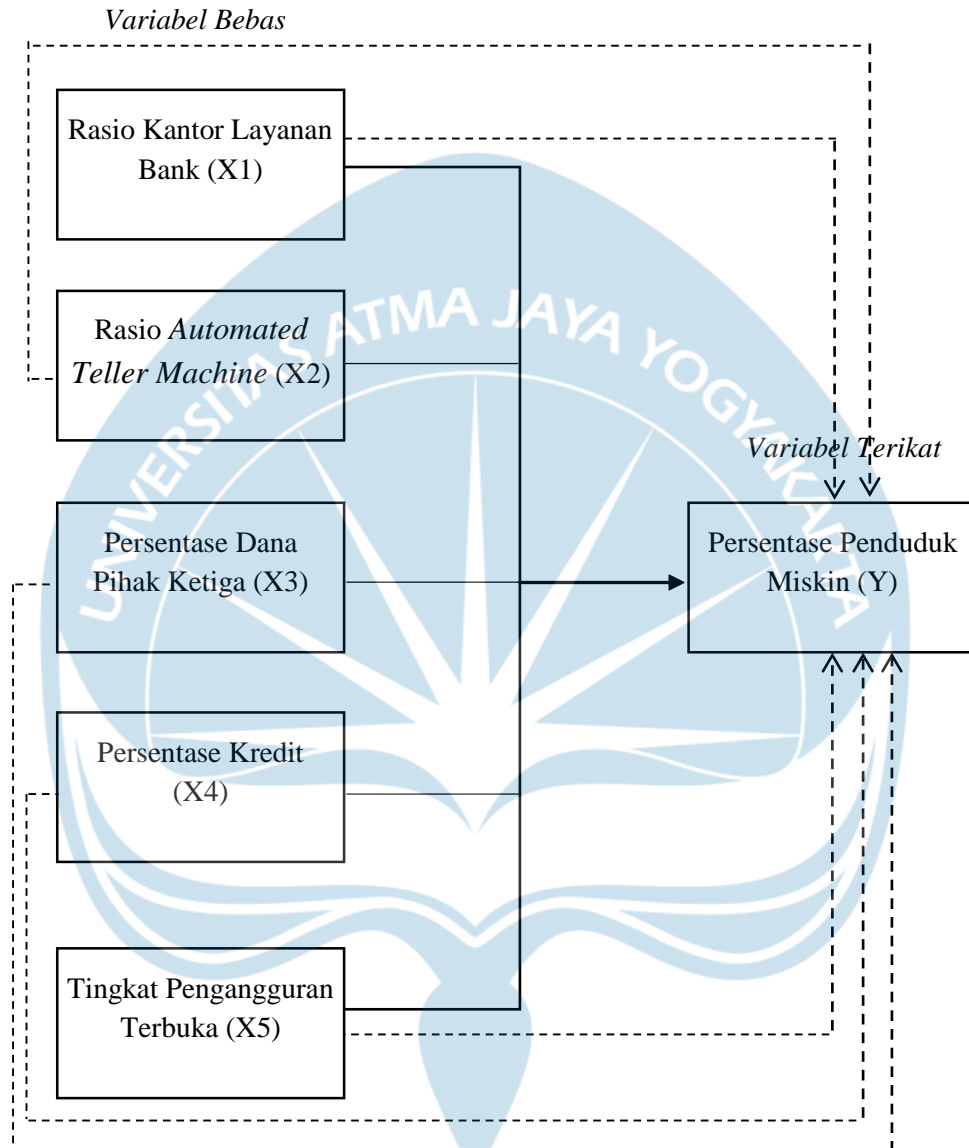
Keuangan (X) yang terdiri dari penetrasi perbankan (X1) yang ditunjukkan oleh populasi yang memiliki rekening bank; akses ke jasa perbankan (X2), ditunjukkan dengan jumlah kantor bank dan ATM yang tersebar di suatu wilayah dan penggunaan jasa perbankan (X3), yang ditunjukkan dengan jumlah simpanan dan pinjaman yang diberikan. Variabel terikat yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi (Y1), kemiskinan (Y2), ketimpangan pendapatan (Y3), dan stabilitas keuangan (Z). Alat analisis untuk model panel data dinamis yaitu Generalized Method of Moments (GMM) menggunakan aplikasi EViews 7. Untuk menghindari masalah multikolinearitas dan metode estimasi model memungkinkan adanya tipe autokorelasi AR (1) pada panel dan korelasi *cross-sectional* dan heteroskedastisitas antar panel. Hasil penelitian menunjukkan secara serentak inklusi keuangan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan stabilitas keuangan di Asia. Dalam penurunan kemiskinan secara individu akses layanan keuangan seperti jumlah kantor layanan bank komersial dan jumlah rekening berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan jumlah ATM, jumlah simpanan dan jumlah pinjaman tidak signifikan.

Berikutnya Inoue (2019) menulis publikasi ilmiah yang membahas tentang dampak pembangunan keuangan melalui bank umum dalam kondisi kemiskinan di India. Peneliti menggunakan data panel yang tidak seimbang untuk 25 negara bagian dan teritori serikat pekerja yang mencakup tujuh periode waktu antara 1973 dan 2004 (1973, 1977, 1983, 1987, 1993, 1999, dan 2004) dan menerapkan Generalized Method of Moments estimation (GMM), penulis memperkirakan model di mana rasio kemiskinan dijelaskan oleh inklusi keuangan dan pendalaman

keuangan untuk bank sektor publik dan bank sektor swasta, masing-masing. Dalam model tersebut, rasio kemiskinan atau persentase penduduk di bawah garis kemiskinan digunakan sebagai *variabel terikat*. *Variabel bebas* dalam penelitian ini adalah inklusi keuangan dengan menggunakan jumlah kantor layanan bank (FI1) dan rekening bank (FI2) untuk mengukur akses dan penggunaan layanan perbankan serta *Financial Deepening* (FD) dengan jumlah kredit bank relatif terhadap PDB nominal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inklusi keuangan dan *Financial Deepening* memiliki hubungan negatif dan signifikan secara statistik dengan rasio kemiskinan untuk bank sektor publik, tetapi tidak untuk bank sektor swasta.

Terakhir Putra dan Arka (2018) menulis publikasi ilmiah yang membahas tentang pengaruh tingkat pengangguran terbuka, kesempatan kerja, dan tingkat pendidikan terhadap tingkat kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali pada tahun 2011-2016. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil analisis menunjukkan tingkat pengangguran terbuka, kesempatan kerja, dan tingkat pendidikan secara serentak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Kesempatan kerja dan tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan. Tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh dominan terhadap tingkat kemiskinan.

2.3 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis Penelitian



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Keterangan:

-----> Pengaruh Individu

—————> Pengaruh Serentak

Penelitian ini berusaha mengidentifikasi apakah variabel bebas yaitu Kantor Layanan Bank, *Automated Teller Machine*, Dana Pihak Ketiga, Kredit, dan Tingkat

Pengangguran Terbuka mempengaruhi variabel terikat yaitu Persentase Penduduk Miskin, dengan hipotesis sebagai berikut:

- 1) Diduga Rasio Kantor Layanan Bank memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Persentase Penduduk Miskin di Indonesia.
- 2) Diduga Rasio *Automated Teller Machine* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Persentase Penduduk Miskin di Indonesia.
- 3) Diduga Persentase Dana Pihak Ketiga memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Persentase Penduduk Miskin di Indonesia.
- 4) Diduga Persentase Kredit memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Persentase Penduduk Miskin di Indonesia.
- 5) Diduga Tingkat Pengangguran Terbuka memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Persentase Penduduk Miskin di Indonesia.

2.4 Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

2.4.1 Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah penduduk miskin dengan satuan persen. Persentase penduduk miskin dalam website BPS merupakan persentase penduduk yang berada di kondisi ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Sehingga penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Persentase penduduk miskin dapat dijelaskan dalam bentuk persamaan (1) sebagai berikut (Badan Pusat Statistik, Tanpa Tahun):

$$P_{\alpha} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^q \left(\frac{z-y_i}{z} \right)^{\alpha} \quad (1)$$

Keterangan:

$\alpha = 0$

z = Garis kemiskinan

y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

n = Jumlah penduduk

2.4.2 Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu Rasio Kantor Layanan Bank, Rasio *Automated Teller Machine*, Persentase Dana Pihak Ketiga, Persentase Kredit, dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Berikut penjelasan masing-masing variabel bebas.

- 1) Kantor layanan bank. Variabel kantor layanan bank pada penelitian ini merupakan rasio jumlah kantor layanan bank per 100 ribu penduduk dewasa di Indonesia, sehingga kantor layanan bank dapat dijelaskan dalam bentuk persamaan (2) sebagai berikut, diadaptasi dari SSKI Bank Indonesia (Bank Indonesia, Tanpa Tahun):

$$KL\text{BANK} = \frac{\text{Jumlah Kantor Layanan Bank}}{\text{Populasi Penduduk Dewasa}} \times 100.000 \quad (2)$$

- 2) *Automated Teller Machine* (ATM). Variabel ATM pada penelitian ini merupakan rasio jumlah ATM per 100 ribu penduduk dewasa di Indonesia, sehingga ATM dapat dijelaskan dalam bentuk persamaan (3) sebagai berikut, diadaptasi dari SSKI Bank Indonesia (Bank Indonesia, Tanpa Tahun):

$$ATM = \frac{\text{Jumlah mesin Automated Teller Machine}}{\text{Populasi Penduduk Dewasa}} \times 100.000 \quad (3)$$

- 3) Dana Pihak Ketiga (DPK). Variabel DPK pada penelitian ini merupakan rasio jumlah DPK per nilai PDRB di Indonesia, sehingga DPK dapat dijelaskan dalam bentuk persamaan (4) sebagai berikut, diadaptasi dari SSKI Bank Indonesia (Bank Indonesia, Tanpa Tahun):

$$DPK = \frac{\text{Jumlah Dana Pihak Ketiga}}{\text{nilai PDRB riil}} \times 100\% \quad (4)$$

- 4) Kredit. Variabel kredit pada penelitian ini merupakan rasio jumlah kredit per nilai PDRB di Indonesia, sehingga kredit dapat dijelaskan dalam bentuk persamaan (5) sebagai berikut, diadaptasi dari SSKI Bank Indonesia (Bank Indonesia, Tanpa Tahun):

$$KRDT = \frac{\text{Jumlah Kredit}}{\text{nilai PDRB riil}} \times 100\% \quad (5)$$

- 5) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran, sehingga TPT dapat dijelaskan dalam bentuk persamaan (6) sebagai berikut (Badan Pusat Statistik, Tanpa Tahun):

$$TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\% \quad (6)$$